

**IMPLEMENTASI PROGRAM *BEING IN ASIA* DI INDONESIA
OLEH UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)**

Oleh: Muhammad Sofyan

Pembimbing: Dr. Umi Oktyari Retnaningsih, MA

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas Km.12,5 smp. Baru Pekanbaru 28293

telp/fax. 0761-63277

ABSTRACT

The obligation to fulfil human rights is a duty of a State. Human rights are the legal rights of every human being of a universal nature. The human rights issue is growing with the high rate of globalization and then there is a pervasiveness of gender minorities in this case: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT). Many LGBT groups in Indonesia have suffered from violence, discrimination and human rights violations, and this is happening because in Indonesia there are no LGBT regulations. In this issue UNDP provides assistance to the LGBT community in Indonesia, through the Being LGBT in Asia program UNDP strives to address inequalities, violence, stigma and discrimination based on a person's sexuality and gender identity. This research uses a qualitative method with a secondary data source, the library research. The result of this study is the role of UNDP in the fight for the rights of the LGBT community in Indonesia.

Keywords: LGBT, Being LGBT in Asia, HAM, UNDP

Pendahuluan

Gender merupakan salah satu hal yang sering dibahas pada jurusan hubungan internasional salah satunya terkait dengan isu mengenai LGBT, isu ini sangat kontroversial di Indonesia. Pada tahun 2016 terjadi sebuah perdebatan antara wakil presiden Indonesia dan komnas HAM terkait pernyataan para pejabat publik mengenai LGBT. Hal ini terjadi karena adanya dugaan bahwa *United Nations Development Programme* (UNDP) memberikan dana kampanye LGBT di Indonesia. Kontroversi eksistensi LGBT di Indonesia masih terjadi hingga sekarang ini sehingga penelitian

tentang perkembangan perjuangan kaum LGBT di Indonesia dengan peran UNDP perlu dilakukan.

Pada era globalisasi ini, isu hak asasi manusia menjadi titik fokus utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Di tengah keragaman budaya, Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak keberagaman menghadapi tantangan besar dalam memastikan perlindungan hak-hak setiap warga negaranya, termasuk anggota komunitas Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT). PBB mengesahkan resolusi persamaan hak tepat pada tanggal 17 Juni 2011 yang berisikan bahwa

setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat dan setiap orang berhak untuk memperoleh hak dan kebebasannya tanpa mengalami diskriminasi apapun. Dewan HAM PBB telah mengesahkan resolusi persamaan hak yang menyatakan bahwa setiap manusia dapat bebas dan memiliki derajat yang sama serta berhak memperoleh hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi apapun.

Pada deklarasi universal HAM pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut. Hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penajahan.

Berbagai HAM yang dilindungi dalam Deklarasi meliputi: hak hidup; bebas dari perbudakan; bebas dari penyiksaan & kekejaman; persamaan dan bantuan hukum; pengadilan yang adil; perlindungan urusan pribadi & keluarga; memasuki dan meninggalkan suatu negara; mendapatkan suaka; hak kewarganegaraan; membentuk keluarga; memiliki harta benda; kebebasan beragama; berpendapat, berserikat dan berkumpul; turut serta dalam pemerintahan; jaminan sosial, pekerjaan, upah layak dan kesejahteraan; pendidikan "gratis" dan kebudayaan. Deklarasi Universal HAM bukan sebuah instrumen yuridis yang memiliki kekuatan mengikat, maka pokok-pokok HAM dan kebebasan fundamental tersebut harus dituangkan dalam instrumen-instrumen yang mengikat secara hukum. Dalam sidangnya di tahun 1951 Majelis Umum PBB meminta

Komisi HAM untuk merancang dua kovenan tentang HAM, satu kovenan mengenai hak sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) dan satu kovenan memuat hak ekonomi, sosial dan budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR). Kemudian pada tahun 1966 terdapat rancangan mengenai kovenan internasional tentang Hak Ekonomi, sosial dan Budaya. Pada beberapa regulasi internasional ini merupakan dasar dari suatu negara dapat membuat peraturan untuk melindungi hak setiap individu. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi *Bill Of Right* yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan hukum mengenai HAM diantaranya yaitu Bahwa hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/ MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas hukum internasional. Kemudian juga terdapat UU No. 12 Tahun 2005 dan UU No.11 Tahun 2005 sebagai kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik.

Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman

mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Diskriminasi dan homophobia yang dilakukan dengan kekerasan yang terjadi di lingkungan sehari-hari baik antara teman maupun keluarga dapat dilakukan pada tempat kerja bahkan pada lingkungan sekolah yang bisa dikatakan tempat nyaman. Banyak juga LGBT yang menjadi korban pelecehan namun mereka sulit untuk mengutarakannya maupun mendokumentasikan hal tersebut karena seksualitas mereka yang berbeda. Diskriminasi terhadap individu baik di tempat kerja, sekolah atau lainnya masih belum mendapatkan perhatian lebih ini disebabkan karena tidak adanya undang-undang anti-diskriminasi maupun suatu kebijakan atau pernyataan sikap yang jelas mengenai orang-orang LGBT. Kurangnya pengetahuan tentang seksualitas pada lingkungan dan hal-hal mengenai seksualitas LGBT dapat berdampak buruk bagi rasa percaya diri pada komunitas LGBT, ini belum termasuk kurangnya informasi dan bimbingan dari orang tua. *bullying* pada mahasiswa LGBT juga merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian.

Dengan segala permasalahan yang muncul tersebut membuat berbagai pergerakan yang mendorong Indonesia agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap komunitas LGBT. Berbagai upaya yang dilakukan oleh aktivis-aktivis INGO atau NGO dengan melakukan dukungan kepada komunitas LGBT

yang ada di Indonesia agar pemerintah segera mengakui hak-hak komunitas LGBT sesuai dengan *Declaration of Human Rights* PBB yang telah ditandatangani dan disepakati bersama seluruh dunia.

Organisasi internasional United Nations Development Programme (UNDP) yang merupakan organisasi multilateral yang paling gencar memberi bantuan dan pembangunan di dunia. Salah satu program UNDP dalam dukungan komunitas LGBT yaitu *Being LGBT in Asia*. UNDP memberikan dukungan kepada komunitas LGBT di Indonesia untuk menuntut agar pemberian pengakuan oleh pemerintah Indonesia mengenai hak mereka sebagai warga negara dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap komunitas LGBT.

Rumusan Masalah

United Nations Development Programme (UNDP) atau dikenal sebagai program pembangunan PBB merupakan organisasi multilateral yang paling besar memberikan bantuan teknis serta dalam memberikan pembangunan dunia.

Banyaknya diskriminasi yang terjadi terhadap komunitas LGBT di Asia termasuk Indonesia, UNDP mempunyai peran dalam hal memperjuangkan hak-hak LGBT di Indonesia. Dengan menjelaskan program bagaimana upaya atau peran dari UNDP dalam memberikan hak untuk komunitas LGBT di Indonesia, peneliti berupaya menuliskan rumusan masalah yang bertujuan untuk mempermudah dalam membahas permasalahan yang diteliti.

Adapaun permasalahan yang akan di angkat pada penelitian ini yaitu **“Bagaimana implementasi Program *Being LGBT In Asia* dapat memberikan Hak Asasi Manusia bagi Komunitas LGBT di Indoensia?”**

Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjaring informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandangan teoritis maupun praktis. Dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandangan teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, data-data yang didapatkan pada penelitian kualitatif tidak dapat dari perhitungan-perhitungan statiska ataupun berbagai hal yang menggunakan perhitungan angka, melainkan dengan menggunakan penjelasan ataupun alasan-alasan tertentu yang berkaitan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Serta metode pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data dalam literature seperti buku cetak, jurnal, paper, koran online atau sumber website yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian

Program *Being LGBT in Asia* merupakan suatu upaya pembelajaran untuk mengatasi ketidaksetaraan, kekerasan, stigma dan diskriminasi yang berorientasi pada seksualitas dan identitas gender seseorang. Prakarsa program ini

merupakan suatu bentuk kesadaran dari berbagai kalangan bahwa komunitas LGBT telah mengalami berbagai bentuk stigma dan diskriminasi dengan berbagai bentuk sehingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kelompok LGBT mulai dari keluarga hingga tempat kerja serta penegakan hukum, media dan layanan Kesehatan dan pendidikan.¹ Program ini merupakan suatu dukungan komunitas LGBT di seluruh Kawasan dan negara- negara yang menjadi fokus tertentu termasuk, Cina, Filipina, Thailand, Indonesia, Nepal, Mongolia, Kamboja, dan Vietnam kemudian, kelompok ini memiliki sasaran ke berbagai kelompok-kelompok kecil yang kemudian akan diperluas menjadi skala besar. Program ini resmi di luncurkan pada tahun 2012 dan diperkirakan akan dilaksanakan hingga Maret 2020.²

Melalui program ini pada tahun 2014 kedutaan besar Swedia di Bangkok, bergabung dengan *U.S Agency for International Development (USAID)* dan *United Nations Development Programme (UNDP)* yang menjadi mitra pendanaan utama untuk menangani masalah hak- hak LGBT. Kemudian pada Juli 2017 dan Agustus 2018 *Faith in Love Foundation* (Hongkong) dan *The Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)* menjadi mitra untuk pendanaan. Selain itu program ini juga melibatkan mitra regional

¹ Laman <https://2012-2017.usaid.gov/asia-regional/being-lgbt-asia> di akses pada 19 April 2024

² Muliastuti, A. (2022). Aktivisme Transnasional dalam Prakarsa *Being LGBT in Asia*: Mobilisasi Gerakan dan Pembentukan Identitas Kolektif. *Jurnal Hubungan Internasional*, 15(2).

seperti *Asean Sogio Caucus* (ASC), Asia-Pacific Transgender Network (APTAN), Asia-Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF), the Economist Events, dan Salzburg Global Forum. Selain itu juga terdapat berbagai organisasi internasional yang terlibat antara lain: (1) Organisasi Perburuan Internasional (ILO); (2) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR); (3) The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS); (4) United Nations Educational; (5) Scientific and Cultural Organization (UNESCO); (6) United Nations Population Fund (UNFPA); (7) UN Women and World Health Organization (WHO) (USAID 2020). Selain itu, *Being LGBT in Asia* juga telah mempertemukan sekitar 200 masyarakat sipil, pemerintah dan pakar hak asasi manusia serta akademisi untuk berpartisipasi dalam Regional Dialogue on LGBTI Human Rights and Health in Asia-Pacific pada 26 sampai 27 Februari 2015 di Pusat Konferensi PBB.³

Lembaga tersebut menjadi mitra dalam program ini dengan alasan kemanusiaan yang dimana kelompok LGBT ini menjadi terpinggirkan dengan tidak mendapatkan akses Kesehatan yang baik, pengucilan pada lingkungan masyarakat dan diskriminasi lainnya yang terjadi. *Being LGBT in Asia* merupakan salah satu wadah bagi Lembaga-lembaga pembangunan internasional dalam mewujudkan agenda pembangunan yang tertuang dalam *the Sustainable Development Goals* (SDG's). Dalam press rilis program ini UNDP dan USAID menjelaskan bahwa keterlibatan

Lembaga regional dan internasional ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan komunitas LGBT.

Dalam menjalankan program *Being LGBT in Asia* difasilitasi dengan internet dan komunikasi elektronik. Kecepatan dalam transfer informasi melalui berbagai platform komunitas berupa pesan teks dan media social dapat memudahkan para aktivis LGBT dapat berkomunikasi satu sama lain dalam jarak yang jauh.⁴ Di dalam penggunaannya kelompok LGBT dapat menyuarakan tuntutan serta membawa perubahan dalam hukum melalui partisipasi masyarakat dalam program tersebut melalui berbagai media social sehingga dapat menciptakan makna yang sama pada akhirnya terjadi perlawanan sipil yang lebih terorganisir.⁵ Selain dapat memanfaatkan internet sebagai media untuk mencari dukungan program ini juga diuntungkan dengan adanya organisasi besar seperti UNDP dan USAID sebagai fasilitator dan penyedia dana dalam memberikan dialog komunitas. Sebagai negeri tujuan dari program ini kemudian adanya dialog yang menghasilkan laporan (*Country report*) yang kemudian akan dipublikasikan UNDP dan USAID hanya menjadi fasilitator tanpa mempengaruhi pesan yang disampaikan oleh komunitas LGBT di Asia.

Program *Being LGBT in Asia* yang muncul melalui aktivis dan komunitas LGBT telah menghadapi masalah dan tantangan yang sama. Upaya yang telah dilakukan dengan

³ Ibid hal 406

⁴ Ibid hal. 407

⁵ https://www.researchgate.net/publication/342082932_Social_Media_and_Social_Movement_Contemporary_Online_Activism_in_Asia Di akses pada 19 April 2024

tujuan membentuk pemahaman yang sama yang didasarkan bahwa hak-hak LGBT merupakan bagian dari HAM yang telah melekat pada setiap manusia tanpa melihat identitas gender maupun orientasi seksual seseorang. Dengan memperkuat jaringan social komunitas diharapkan program ini dapat membuka peluang untuk memperluas untuk mendapatkan simpati dan dukungan, sehingga dapat menarik perhatian dari media hingga hasil akhir dari Gerakan tersebut mendapatkan tujuan awal yaitu hak-hak LGBT yang awalnya hanya terkonsentrasi di wilayah tujuan menjadi menyebar di berbagai wilayah yang ada di Asia.⁶ Sebenarnya tiap negara memiliki kondisi yang berbeda meskipun dalam hal tertentu terdapat kondisi yang sama yang dapat kita lihat mulai dari pengaruh agama, sikap social budaya, nilai-nilai tradisional keluarga hingga kondisi politik dan konstitusi suatu negara dalam pandangan terhadap isu LGBT.

Penolakan dan diskriminasi terhadap LGBT juga ditemukan secara halus di negara-negara Asia.⁷ Kondisi ini juga di pertegas dengan nilai-nilai tradisional pada lingkungan tradisional yang masih menggambarkan social budaya tertentu. Tuntutan harus membangun sebuah keluarga, menghasilkan keturunan, serta mempertahankan nilai yang ada di keluarga, sehingga hal ini membuat kelompok LGBT harus menyembunyikan identitasnya. Selain itu di negara Asia nilai agama juga merupakan peran yang

signifikan dalam mempengaruhi pandangan dari masyarakat terhadap komunitas LGBT.

Melibatkan Lembaga Nasional dan Daerah

Gerakan LGBT mulai berkembang melalui berbagai kegiatan pengorganisasian yang dilakukan oleh kelompok wanita transgender atau yang dikenal dengan waria. Mobilisasi dengan menggunakan media cetak dan pembentukan kelompok kecil di Indonesia yang di dorong dengan maraknya kasus HIV membuat berbagai pertemuan nasional dengan disertai perkembangan penting dalam Gerakan LGBT. Pada dialog komunitas yang dilaksanakan pada Juni 2013 yang melibatkan 71 peserta dari 49 lembaga yang mewakili berbagai organisasi LGBT di Indonesia, kemudian juga terdapat wakil-wakil dari pemerintahan, Lembaga hak asasi internasional, perguruan tinggi, lembaga non-pemerintahan, organisasi bantuan hukum dan organisasi masyarakat madani, serta beberapa tokoh agama.

Advokasi dan Kebijakan Perlindungan LGBT

Dengan adanya kelompok LGBT yang terlibat untuk terlibat dengan Lembaga tingkat negara dengan tujuan mengadvokasikan undang-undang kemudian dapat menyampaikan kebijakan mengenai perlindungan kelompok LGBT dan mendukung kegiatan pemberdayaan dan mobilisasi kelompok LGBT. Pada program *Being LGBT in Asia* juga mendukung adanya dialog multistakeholder mengenai hak LGBT, kemudian adanya promosi kerangka kerja advokasi dalam mengatasi diskriminasi dan

⁶ Muliastuti, A. (2022). Aktivisme Transnasional dalam Prakarsa Being LGBT in Asia: Mobilisasi Gerakan dan Pembentukan Identitas Kolektif. *Jurnal Hubungan Internasional*, 15(2).

⁷ Ibid Hal. 412

membantu dalam menghadapi tantangan hukum.

Menghasilkan Mitra, Dialog dan Pemahaman

Pada kemitraan ini dapat mengkaji hak-hak LGBT di Asia kemudian mengadakan dialog tingkat nasional kemudian hasil dari dialog tersebut yaitu laporan yang fokus di Kamboja, Tiongkok, Indonesia, Mongolia, Nepal, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Pada kegiatan ini bekerja sama dengan Kaukus Orientasi Seksual-Identitas Gender ASEAN, Jaringan Transgender Asia-Pasifik, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) dan Forum Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional Asia-Pasifik. Pada web “Being LGBT in Asia” memproduksi informasi LGBT dan testimoni di situs aplikasi web B-Change yang berbasis di Filipina, ‘Be’ dan ‘Plus’ dan aktif hadir melalui social media seperti Facebook, Instagram, dan situs media social populer Tiongkok yaitu Weibo, dan platform lainnya.⁸

Laporan LGBT Nasional

Laporan nasional merupakan bagian program *Being LGBT in Asia* yang dibuat dan kemudian dipublikasikan dengan dukungan UNDP dan USAID yang di rulis pada tahun 2017. Laporan nasional ini hanya mencakup beberapa negara fokus program *Being LGBT in Asia* yaitu China, Filipina, Indonesia, Kamboja, Mongolia Nepal, Thailand dan Vietnam. Pada laporan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai berbagai

tantangan baik pada hukum, politik dan social yang dihadapi oleh kelompok LGBT. Tidak hanya itu pada laporan ini juga kita dapat melihat bagaimana aspek hukum dan kebijakan yang terkait serta bagaimana kenyataan peluang akses mereka pada Pendidikan dan Kesehatan. Tidak hanya itu pada laporan ini juga membahas bagaimana organisasi LGBT baik pada ruang gerak mereka, kapasitas organisasi serta harapan untuk dilibatkan pada dialog kebijakan dan hak asasi manusia. Laporan LGBT nasional juga terdapat rekomendasi bagi komunitas dan organisasi LGBT, pemerintah dan Lembaga internasional kemudian juga terdapat bagaimana gambaran umum mengenai hak-hak LGBT sehubungan dengan undang-undang, kebijakan pemerintah, sikap social, budaya, dan agama.

Respon Indonesia pada *Being LGBT In Asia*

Dari beberapa kasus LGBT yang muncul kemasyarakat menunjukkan fenomena LGBT banyak yang masih belum menerima. Berdasarkan pendiri komunitas LGBT di Indonesia ia mengharapkan Indonesia melegalkan pernikahan sejenis namun menurutnya perlu mempersiapkan masyarakat untuk menerima keputusan tersebut. Tentu dengan tahapan yang sejalan dengan program *Being LGBT in Asia* menggunakan internet dengan terus memproduksi konten di media social sehingga masyarakat terbiasa dan menerima LGBT sebagai sesuatu

⁸ “Menjadi LGBT di Asia” <https://2012-2017.usaid.gov/asia-regional/being-lgbt-asia> Di akses pada 23 April 2024

yang tidak bisa di ubah.⁹ Respon pemerintah Indonesia dengan program *Being LGBT in Asia* cukup negative ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang mayoritas beragama islam tentu saja ini sudah melanggar aturan agama tersebut dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat. Pernikahan dan jenis kelamin yang diakui hak nya juga sudah di jelaskan pada Undang-Undang 1945 sehingga akan sangat sulit untuk menormalisasi hak LGBT di Indonesia.

Kesimpulan

Pandangan dunia pada LGBT sudah mulai berubah dengan pesatnya kemajuan pengetahuan dan teknologi. Namun pro kontra yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai LGBT terus berlanjut di Indonesia sebagai negara yang menganggap bahwa LGBT merupakan suatu yang kontroversial dan sesuatu yang menyimpang. Sebagai salah satu negara anggota dari PBB Indonesia tentu saja ikut dalam perjuangan Hak Asasi Manusia dan penghapusan diskriminasi. UNDP sebagai suatu organisasi internasional yang terus memperjuangkan HAM tidak terkecuali bagi komunitas LGBT yang berkembang terus menerus. Melalui program *Being LGBT in Asia* UNDP yang telah menjalin kerja sama dengan berbagai mitra seperti USAID dan kedutaan Swedia di Bangkok dengan tujuan untuk memperjuangkan hak bagi komunitas LGBT dan penghapusan diskriminasi yang di alami oleh LGBT. Pada

program ini UNDP berkolaborasi dengan masyarakat sipil kemudian melibatkan institusi nasional untuk memajukan hukum dan kebijakan.

Pada program ini UNDP juga telah merinci berbagai tujuannya salah satunya yaitu mendukung kaum LGBT untuk mengetahui hak-hak mereka dan mendapatkan akses ke pengadilan guna melaporkan pelanggaran-pelanggaran HAM. Adapun hasil-hasil yang ingin dicapai dari proyek ini, salah satunya adalah meningkatnya kemampuan organisasi-organisasi LGBT untuk secara efektif memobilisasi, menyokong dan berkontribusi dalam dialog-dialog kebijakan dan aktivitas pemberdayaan komunitas serta membantu LGBT untuk mendapatkan hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Tahun 2017 UNDP bersama USAID mendukung Komunitas LGBT di Indonesia dengan menghasilkan Laporan LGBT Nasional yang berisikan laporan LGBT nasional berupa rekomendasi-rekomendasi ditujukan kepada komunitas LGBT Indonesia, pemerintah Republik Indonesia dan lembaga-lembaga internasional sebagai hal yang perlu ditindak lanjuti dan diprioritaskan selama tahun 2013-2017.

Namun, Meskipun UNDP dengan program *Being LGBT in Asia* yang memiliki peran untuk memperjuangkan HAM bagi komunitas LGBT di Indonesia. Program tersebut mendapat peringatan keras atau penolakan di Indonesia dikarenakan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan bagi sebagian orang LGBT merupakan hal yang menyimpang. Ini juga sudah di tegaskan pada Undang- Undang yang berlaku di Indonesia yang

⁹

<https://news.republika.co.id/berita/p1khp7396/begini-cara-kampanye-komunitas-lgbt-di-internet> Di Akses pada 23 April 2024

menegaskan di dalamnya bahwa yang di akui di negara ini hanya laki-laki dan perempuan.

Daftar Pustaka

E-Book

Archer, C. (2002). International organisations. Routledge.

Bennett, A. L. (1980). International organizations: Principles and issues. In International organizations: principles and issues. Prentice-Hall, Inc.

George C. (1998) "Hak Asasi Manusia: Sebuah Pengantar"
Di akses pada 19 Desember 2023
https://perpustakaan.komnaspeempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4266

Mas'oed, Mohtar. 1994. Ilmu Hubungan Internasional:

Kunfay, Z. Peran United Nations Development Programme (Undp) Dalam Perjuangan Hak Asasi Manusia Komunitas Lesbians, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Di Indonesia. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(2), 1-15.

Kusmaryanto, C. B. (2021). Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?. *Jurnal HAM*, 12(3), 523.

Manik, T. S., Riyanti, D., Murdiono, M., & Prasetyo, D. (2021). Eksistensi LGBT Di Indonesia dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, dan Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18.

Disiplin dan Metodologi. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
Suryokusumo, S. (1990). *Hukum Organisasi Internasional*. Penerbit Universitas Indonesia.

Anam Choirul, Muhammad Felani (2016) *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas*. Penerbit Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Rhona K. Smith, at. al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, hal. 39

Jurnal

Muliastuti, A. (2022). Aktivisme Transnasional dalam Prakarsa Being LGBT in Asia: Mobilisasi Gerakan dan Pembentukan Identitas Kolektif. *Jurnal Hubungan Internasional*, 15(2).

Olivia, Yessi. "Level Analisis Sistem Dan Teori Hubungan Internasional." *Jurnal Transnasional* 5, no. 1 (2013): 896–912.
<https://transnasional.ejournal.uinri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1796>.

Sari, S. (2015). Peran United Nations Development Programme (Undp) Dalam Mewujudkan Millenium D Evelopment Goals (MDGs) 2015. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 4.

- Tama, A., & Yealta, D. (2017). Peran united nations development programme (UNDP) dalam melegalkan pernikahanlesbian, gay, bisexual, transgender (LGBT) di Tiongkok (Doctoral dissertation, Riau University).
- Hussein, T. C. (1992). Posisi Kelompok Minoritas Magribi Dalam Masyarakat Perancis Pada Dasawarsa 1980. Skripsi Pada Fakultas Sastra UI, Jakarta, 3.
- Tiara, Auliya (2022) PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN DENGAN MEDIA SLIDE POWERPOINT DAN LEAFLET TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) PADA REMAJA DI SMKN X PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.
- Hernawati, T. N. D. (2023). BINGKAI MINORITAS LGBTQ DI MEDIA ALTERNATIF KONDE. CO (Doctoral dissertation, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Ardhiani, W., Sunita, A., Ariani, N. P., & Subandi, S. (2020). Gambaran Perilaku Lingkungan Sosial yang Mengarah Kepada Lesbian, Gay, Bisexual, Dan Transgender (LGBT) Pada Remaja Di SMA "X" Kabupaten Bogor Tahun 2020 (Doctoral dissertation, Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung).
- Fadhli, Y. Z. (2014). Kedudukan kelompok minoritas dalam perspektif HAM dan perlindungan hukumnya di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 11(2), 352-370.
- Bagir Manan, Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia (Butir-Butir Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H.,M.H) (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2009), hal. 163.
- Komnas Perempuan, Laporan Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia tentang 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global Beijing Platform for Action, disampaikan kepada Commission on the Status of Woman tanggal 27 September 2019, hal. 24.
- Jurnal PERLINDUNGAN HUKUM TERH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK MINORI OMPOK MINORITAS GENDER SEBA GENDER SEBAGAI IMPLEMEN GAI IMPLEMENTASI PEMENUH ASI PEMENUHAN HAK ASASI AK ASASI MANUSIA (PERBANDINGAN KASUS L A (PERBANDINGAN KASUS LGBT DI INDONESIA, INDI A, INDIA DAN BRUNEI DARUSSALAM) Di akses pada 03 April 2024

Muliastuti, A. (2022). Aktivisme Transnasional dalam Prakarsa Being LGBT in Asia: Mobilisasi Gerakan dan Pembentukan Identitas Kolektif. *Jurnal Hubungan Internasional*, 15(2).

Website

Alisa Tang, Under Attack, Indonesian LGBT Groups Set Up Safehouses, Live in Fear Under attack, Indonesian LGBT groups set up safehouses, live in fear | Reuters Di Akses pada tanggal 01 Januari 2024

GAYa Nusantara Kesetaraan, kesejahteraan orang-orang dengan orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender, dan karakteristik seks yang beragam (gayanusantara.or.id) Di Akses pada tanggal 01 Januari 2024

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Di akses melalui [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) pada tanggal 13 Desember 2023

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perempuan https://perpustakaan.komnaspeempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4266 Di akses pada tanggal 19 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&>

[menu=2](#) Di Akses pada tanggal 13 Desember 2023

Max Ki. (2023) “Dampak Buruk LGBT” Di akses pada 19 Desember 2023 <https://umsu.ac.id/berita/dampak-buruk-lgbt/>

The Jakarta Post Di akses melalui <https://www.thejakartapost.com/news/2015/07/02/difficult-indonesia-legalize-gay-marriage-minister.html> pada tanggal 13 Desember 2023

United Nations Development Programmes Di akses melalui (<https://www.undp.org/about-us/faqs>) pada tanggal 12 Desember 2023

Universitas Airlangga <https://e-journal.unair.ac.id/JHI/article/download/35109/23336/184412> Di akses pada tanggal 19 Desember 2023

Universitas Ciputra (<https://dspace.uc.ac.id/bitstream/handle/123456789/3096/BAB%20III.pdf?sequence=5&isAllowed=y>) Di akses pada tanggal 30 November 2023

Universitas Komputer Indoensia <https://repository.unikom.ac.id/30693/> Di Akses pada tanggal 19 Desember 2023

Badan Kepegawaian Negara “Undang-Undang Dasar dalam Satu Naskah” <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf> Di Akses pada 24 Maret 2024

Syalaby Achmad (2016), “Berapa sebenarnya jumlah Gay di

- Seluruh Indonesia?”
<https://news.republika.co.id/berita/01e9ut394/berapa-sebenarnya-jumlah-gay-di-seluruh-indonesia> Di akses pada 12 Mei 2023
- Bahar Nori (2020), “Problematika LGBT dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”
<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/53670/problematika-lgbt-dalam-> di akses pada 02 April 2024
- Rinai (2024), “Riak Wacana Perda Anti LGBT di Riau: Moralitas, Kemanusiaan dan Politisasi Momen”
<https://www.halloriau.com/read-lifestyle-1439037-2023-06-06-riak-wacana-perda-anti-lgbt-di-riau-moralitas-kemanusiaan-dan-politisasi-momen.html> Di akses pada 08 April 2024
- “A World of Development Experience”
<https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publication/s/IAR03completeE.pdf> di Akses pada 22 April 2024
- “Responsive and Accountable Institution”
<https://www.undp.org/asia-pacific/responsive-and-accountable-institutions> DI akses pada 22 April 2024
- “Democratic Governance and Peacebuilding”
<https://www.undp.org/nigeria/democratic-governance-and-peacebuilding> Di akses pada 22 April 2024
- “About Indonesia”
<http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/countryinfo.html> Di Akses pada 22 April 2024
- “Strategi Nasional Akses pada Keadilan (SNAK)”
<https://www.undp.org/indonesia/publications/strategi-nasional-akses-pada-keadilan-snak> Di Akses pada 22 April 2024.
- Laman DPR RI
<https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/kamus/file/kamus-156.pdf> di akses pada 13 Mei 2024
- Laman USAID <https://2012-2017.usaid.gov/asia-regional/being-lgbt-asia> di akses pada 19 April 2024
- Basu Thakur Priyam, (2016) “Social Media and Social Movement: Contemporary Online Activism in Asia”
https://www.researchgate.net/publication/342082932_Social_Media_and_Social_Movement_Contemporary_Online_Activism_in_Asia Di akses pada 19 April 2024
- “Menjadi LGBT di Asia”
<https://2012-2017.usaid.gov/asia-regional/being-lgbt-asia> Di akses pada 23 April 2024
- Laman Rumah Cemara “Laporan LGBT Nasional Indonesia”
<https://rumahcemara.or.id/wp-content/uploads/2022/10/Hidup-sebagai-LGBT-di-Asia.pdf> Di Akses pada 23 April 2024
- Uli Hutapea Rita, (2016) “UNDP KUCURKAN Rp. 108 M Untuk Dukung LGBT di Indonesia dan 3 Negara Asia”

- <https://news.detik.com/internasional/d-3140618/undp-kucurkan-rp-108-m-untuk-dukung-lgbt-di-indonesia-dan-3-negara-asia> Di Akses pada 23 April 2024
- Indriani (2016), “Pemertu pertanyakan dana UNDP untuk LGBT Indonesia” <https://jambi.antaranews.com/berita/310586/pemerhati-pertanyakan-dana-undp-untuk-menjadi-lgbt-di-asia> Di Akses pada 23 April 2024
- Santoso Budhi (2022) “Bersama membendung LGBT di Asia” <https://www.antaranews.com/berita/2930741/bersama-membendung-lgbt-di-indonesia> Di Akses pada 14 Mei 2024
- [lgbt-indonesia](https://news.republika.co.id/berita/o2kqv3219/dpr-pertanyakan-lolosnya-dana-undp-untuk-lgbt) Di Akses pada 23 April 2024
- Rachman Taufik, (2016) “DPR pertanyakan lolosnya Dana UNDP untuk LGBT” <https://news.republika.co.id/berita/o2kqv3219/dpr-pertanyakan-lolosnya-dana-undp-untuk-lgbt> Di Akses pada 23 April 2024
- Sadewo Joko (2016) “Ini sikap pemerintah atas Proyek asia Di Akses pada 23 April 2024
- Yulianto Agus (2017) “Begini cara kampanye komunitas LGBT di Internet?” <https://news.republika.co.id/berita/p1khp7396/begini-cara-kampanye-komunitas-lgbt-di-internet> Di Akses pada 23 April 2024